

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Kendal

Halaman 11

Cabut Aturan Periksa Hanya di RSUD

▶ Apjati Jateng Laporkan Dugaan Monopoli Cek Medis Calon TKI Kendal ke Ombudsman dan KPPU

KENDAL, TRIBUN - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) DPD Jateng melaporkan dugaan monopoli pemeriksaan medis calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kendal ke Ombudsman RI kantor perwakilan Jawa Tengah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Jika terbukti ada monopoli, mereka berharap, kebijakan yang dinilai menghambat proses pemberangkatan calon TKI ini dicabut.

"Sudah, surat aduan sudah kami layangkan (ke Ombudsman dan KPPU) sejak pekan lalu," kata Sekretaris Apjati DPD Jateng, Ika Khikmah, saat dihubungi Tribun Jateng, Rabu (12/9).

Menurut Ika, aduan tersebut juga dikirim ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sebagai tembusan.

"Kami berharap, praktik monopoli terkait rekam medis hanya di RSUD Kendal bagi calon TKI segera dihapuskan. Sehingga, calon TKI punya pilihan, mau rekam medis di sarana kesehatan (sarkes) milik pemerintah

STORY HIGHLIGHTS

- Apjati resmi laporkan dugaan monopoli pemeriksaan kesehatan calon TKI Kendal ke Ombudsman RI perwakilan Jateng dan KPPU.
- Dugaan monopoli ini muncul lantaran calon TKI yang akan berangkat ke Singapura dan Hongkong akan mendapat identitas diri jika cek kesehatan di RSUD dr H Soewondo Kendal.
- Saat ini, tim Ombudsman masih mempelajari laporan tersebut.

atau swasta," ucapnya.

Asisten Ombudsman RI kantor perwakilan Jateng, Belinda W Dewanty, mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari Apjati terkait dugaan monopoli pemeriksaan kesehatan calon TKI di Kendal. Saat ini, tim yang ditunjuk tengah memeriksa kelengkapan syarat materiil dan formil laporan tersebut.

"Masih ditelaah tim. Nanti, pelapor akan dihubungi Ombudsman atas laporannya agar melengkapi informasi dan data pendukung yang diperlukan," ujarnya.

Sementara, Komisioner Ombudsman Jateng, Sabarudin Hulu, mengatakan, pihaknya akan memeriksa se-

gala sesuatu terkait kebijakan yang mewajibkan calon TKI melakukan rekam medis di RSUD dr H Soewondo Kendal. Diketahui, kebijakan ini dilandaskan pada peraturan bupati (Perbup) 38/2017 tentang Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN).

Di samping itu, menurut dia, juga akan dilakukan klarifikasi ke Pemkab setempat terkait dugaan praktik monopoli itu. "Nanti kami telaah, apakah kebijakan ini bertentangan atau melampaui aturan perundangan yang berada di atasnya. Kalau memang bertentangan dan melampaui, berarti terjadi mal administrasi di sana," katanya.

Terlebih, sambung Sabarudin, persoalan pelayanan dan perlindungan terhadap calon TKI, saat ini memang menjadi perhatian Ombudsman RI. Karena itu, menurutnya, ada tim di Ombudsman pusat, yang khusus mencari dan mengumpulkan informasi, terkait persoalan calon TKI itu, ke berbagai daerah.

Bisa Digugat

Terpisah, Kepala Ombudsman RI kantor perwakilan Jateng, Acim Dartasim, mengatakan, peraturan bupati

(Perbup) Kendal yang dipersoalkan, bisa diuji publik. Syaratnya, aturan itu dirasa bertentangan atau membebankan masyarakat.

"Kalau misalnya dianggap tidak sesuai, ada alasan-alasan yang bertentangan gitu, ya monggo digugat ke PTUN, gak papa kalau seperti itu," tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah calon TKI dan perusahaan penyalur jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) di Kendal mengeluhkan prosedur cek kesehatan bagi calon TKI yang akan berangkat ke Singapura dan Hongkong. Para calon TKI itu bisa mendapat identitas resmi jika periksa kesehatan di RSUD dr H Soewondo Kendal.

Kebijakan ini tertuang dalam Perbup 38/2017 sebagai tindak lanjut dari diresmikannya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Kendal. Perbup ini diteken 1 Agustus 2018.

Selain tak bisa memilih ke fasilitas kesehatan swasta, mereka mengatakan, pemeriksaan medis di RSUD Kendal itu lebih mahal dan lama. Mereka harus mero-goh kocek Rp 770 ribu untuk sekali cek kesehatan yang diperlukan. Hasil tes juga baru keluar sepekan kemudian. (yan/dna)